



# *Jurnal Akuntansi*

Volume 2 – Nomor 3, Oktober 2012

---

## **Local Finance**

- APBD KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN ERA OTONOMI DAERAH  
Dewi Sartika dan Abdullah
- KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUKAN OTONOMI DAERAH  
Riske Biade dan Robinson
- ANALISA KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN  
Dewi Puspita Sari dan Baihaqi
- KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HASIL PEMEKARAN DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH  
Zahrah Indah Ferina dan Robinson
- PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
Riyan Dwi Pratama dan Nila Aprila
- EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN  
Suhendarty dan Fitrawati Ilyas



# Jurnal Akuntansi

Volume 2, Nomor 3, Oktober 2012

<b><u>Local Finance</u></b>	238-255
APBD KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN ERA OTONOMI DAERAH Dewi Sartika dan Abdullah	
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUKAN OTONOMI DAERAH Riske Biadedan Robinson	256-280
ANALISA KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN Dewi Puspita Sari dan Baihaqi	281-310
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HASIL PEMEKARAN DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH Zahrah Indah Ferina dan Robinson	311-332
PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Riyan Dwi Pratamadan Nila Aprila	333-356
EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN Suhendarty dan Fitrawatillyas	357-378

## APBD KABUPATEN KOTA DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN ERA OTONOMI DAERAH

Dewi Sartika  
[sartika.dewi@gmail.com](mailto:sartika.dewi@gmail.com)  
Abdullah

### ABSTRACT

The research decriptively analysis that aimed to understand whether the increase of financial ability of local goverment occurs in financing goverment activities, local development and public area service that listed in APBD of Regency and municipality oh South Sumatera Area fiscal year of 2004-2006. The analysis was conducted by use four analysis methods, namely: comparative analysis, trend analysis, commonsize financial statement analysis and ratio analysis. The use ratio analysis of local of local financial autonomy and ratio of compatibility.

Result of this research shown that ability of local goverment in financing goverment activities, local development and public social service had decreased, because financial ability of local goverment is still low and far as named to be autonomous. Mostly local income have a source of balancing-fund, so dependency level towards fund-sources of central/provincial goverment is very high. Allocation of local expenses for development activities and public social service have begun to be priority although the ezpenses that allocated for goverment activities had to being main priority still.

**Keywords:** *Realization statement of APBD, local goverment of regency /municipality, financial ability, local income, local expenses*

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan sektor publik semakin pesat seiring adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Pertimbangan yang mendasari perlu diselenggarakannya otonomi daerah adalah sehubungan dengan adanya perkembangan kondisi di dalam dan di luar negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi DAERAH No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999.

Konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang lebih jauh dijabarkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah.

Menurut Widodo (2002) kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan penulis teliti apakah terjadi peningkatan kemampuan keuangan pemerintahan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat yang tertuang dalam APBD masing-masing kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Bagian Selatan dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2006.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang ditampilkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik direncanakan dengan dua pendekatan. Pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional dan anggaran dengan pendekatan *new public management* (Mardiasmo, 2002:75)

#### **2.1.1 Incrementalism**

Anggaran tradisional yang bersifat *incrementalism* cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis (*historic cost of service*). Logikanya teknik penganggaran tradisional ini adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya.

#### **2.1.2 Line-Item**

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur *line-item* dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal ini, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran.

#### **2.1.3 Performance Budgeting**

*Performance budgeting* yang biasa disebut anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan dan sasaran program (Mardiasmo, 2002:84). Pendekatan ini

mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

#### **2.1.4 Zero Based Budgeting**

*Zero based budgeting* adalah suatu pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang menekankan pada kebutuhan saat ini dan tidak berpatokan pada anggaran masa lalu (Mokoginto, 2002:240).

#### **2.1.5 Planning, Programming and Budgeting System**

Planning, programming and budgeting system (PPBS) adalah suatu pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang didasarkan pada output dan tujuan (Mardiasmo, 2008:87)

### **2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut PP No 108 Tahun 2000 dan KepMendagri No 29 Tahun 2002 mendefinisikan APBD sebagai suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.

### **2.3 Struktur APBD**

Struktur APBD yang dibahas dalam penelitian ini adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih mengacu pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002.

#### **2.3.1 Pendapatan**

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai penambahan kekayaan bersih. Terdiri dari PAD (Pajak Daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta lain-lain pendapatan yang sah seperti Hibah, dana darurat dan lain-lain)

#### **2.3.2 Belanja**

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai pengurang kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja aparatu, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak bersangka.

#### **2.3.3 Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah, pengeluaran daerah.

## 2.4 Pengelolaan keuangan Daerah

Berndasarkan Permendagri No 13 tahun 2006, Pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

## 2.5 Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan APBD berdasarkan Kemendagri No. 29 tahun 2002 terdiri dari empat tahap yaitu :

- 1) Penyusunan arah dan kebijakan umum (AKU) APBD, AKU APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
- 2) Penyusunan strategi dan prioritas APBD yang disusun berdasarkan AKU APBD.
- 3) Penyusunan rencana anggaran satuan kerja. Rencana anggaran satuan kerja memuat usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap perangkat daerah.

## 2.6 Perhitungan APBD

Dituangkan Dalam laporan perhitungan APBD yang berisikan perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggran tertentu, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

## 2.7 Pertanggungjawaban APBD

Kepmendagri No. 29 tahun 2002 menetapkan 3 bentuk laporan keuangan daerah yaitu:

- 1) Laporan keuangan pengguna anggaran
- 2) Laporan Triwulan
- 3) Laporan akhir tahun anggaran

## 2.8 Analisis APBD

Data APBD dianalisis dengan menggunakan empat teknik analisis yaitu perbandingan, *trend*, *common size financial stetment* dan rasio. Yang masing-masing dapat dilihat pada contoh tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Analisis Pembandingan**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah Kota B**  
**Tahun Anggaran 2003-2005**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Item Pendapatan Daerah	Kota B			Selisih lebih/(Kurang)	
	2003	2004	2005	2003-2004	2004-2005
Pendapatan Asli Daerah	213.029,46	223.750,66	245.467,71	10.721,20	21.717,05
Dana Perimbangan	622.457,51	675.358,84	693.610,48	52.901,33	18.251,64
Lain-lain pendapatan yang sah	126.081,79	128.900,54	138.562,55	2.818,75	6.662,01
<b>Pendapatan</b>	<b>961.568,76</b>	<b>1.028.010,04</b>	<b>1.077.640,74</b>	<b>66.441,28</b>	<b>49.630,70</b>

**Tabel 2.2**  
**Analisis Trend**  
**Perkembangan Anggaran Belanja Daerah**  
**Kabupaten dan Kota Provinsi A**  
**Tahun Anggaran 2003-2005**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

KAB/KOTA	Total Belanja Daerah			Trend (%)	
	2003	2004	2005	2004	2005
Kabupaten A	818.146,42	845.751,52	916.166,34	103,3	108,3
Kota B	826.611,84	896.837,68	936.981,06	108,4	104,4

**Tabel 2.3**  
**Analisis Common Size Statement (CFS)**  
**APBD di Kota Provinsi A**  
**Tahun Anggaran 2003-2005**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Item Pendapatan Daerah	Kabupaten dan Kota		Analisis CSFS (%)	
	Kabupaten A	Kota B	Kab. A	Kota B
Pendapatan Asli Daerah	99.760,58	213.029,46	9,7	22,2
Dana Perimbangan	872.550,07	622.457,51	84,3	64,7
Lain-lain Pendapatan yang sah	61.826,25	126.081,79	6,0	13,1
<b>Pendapatan</b>	<b>1.034.136,90</b>	<b>961.568,76</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sementara analisis rasio dalam penelitian ini yang dapat dikembangkan adalah rasio kemandirian keuangan dan rasio keserasian (Widodo, 2002). Dimana Rasio kemandirian keuangan daerah yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri (Widodo, 2002). Sedangkan rasio keserasian menggambarkan pemda memprioritaskan alokasi pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.



**Tabel 2.4**  
**Analisis Rasio Kemandirian**  
**APBD Kabupaten dan Kota Provinsi A**  
**Tahun Anggaran 2003-2005**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Item Pendapatan Daerah	Kabupaten/Kota	
	Kabupaten A	Kota B
Pendapatan Asli Daerah	99.760,58	213.029,46
Dana Perimbangan	872.550,25	622.457,51
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	61.826,25	126.081,79
Jumlah Pendapatan	1.034.136,90	961.568,76
Rasio Kemandirian (%)	11.4	34.2

**Tabel 2.5**  
**Analisis Rasio Kesenjangan**  
**APBD Kabupaten dan Kota Provinsi A**  
**Tahun Anggaran 2003-2005**  
**(Dalam persen)**

No	Kab/Kota	Rasio Kesenjangan											
		Belanja Aparatur			Belanja Pelayanan Publik			Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan			Belanja Tidak Tersangka		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	Kab. A	76.50	76.70	76.60	11.20	11.20	11.20	11.20	10.90	10.70	1.10	1.30	1.1
2	Kota. B	46.00	45.60	45.50	44.10	44.10	44.20	9.20	9.00	9.20	0.70	1.20	1.1

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan cara-cara pengumpulan data kuantitatif dan akurat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2002 :26)

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi APBD meliputi anggaran, belanja dan pembiayaan daerah.

#### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 50 laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dengan sampel berupa 23 laporan ringkasan realisasi APBD kabupaten dan kota wilayah Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2004-2006.

##### 3.3.1 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampelnya adalah *sampling non-probability* dengan *purposive sampling*. Kriterianya adalah sebagai berikut :



- 1) Laporan realisasi APBD yang menjadi sampel telah sesuai dengan tata cara penyusunan APBD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002
- 2) Ketersediaan data, sampel merupakan data realisasi APBD yang telah dipublikasikan dalam situs Dirjen Perimbangan Keuangan dari tahun 2004-2006 ([www.dipk.depkeu.go.id](http://www.dipk.depkeu.go.id))

### 3.4 Metode Analisis Data

Data APBD dianalisis dengan menggunakan perbandingan, *trend*, *common-size financial statement*, dan rasio.

- 1) Analisis pembandingan

$$\text{Pembandingan (P)} = X_n - X_{n-1}$$

X = item APBD

n = tahun yang dianalisis

n-1 = tahun dasar sebelum tahun n

- 2) Analisis *Trend*

$$\text{Trend} = \left( \frac{X_n}{X_{n-1}} \times 100\% \right) + 100\%$$

- 3) CSFS

$$\text{CSFS} = \frac{X_s}{Y_s} \times 100\%$$

- 4) Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

- 5) Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Z} = \frac{\text{Total belanja Z}}{\text{Total Belanja}} \quad \text{Z = Jenis Belanja}$$

## 4. Pembahasan

### 4.1 Deskripsi Data

Data yang diperoleh mencakup nilai maksimum, minimum, rata-rata. Item data laporan meliputi total penerimaan, PAD, dana perimbangan, bagian lain-lain penerimaan yang sah, dan total belanja seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 Deskripsi data tahun 2004 (dalam jutaan rupiah)**

Item APBD	Maksimum	Minimum	Rata-rata
Total Penerimaan	581.509,62	68.860,30	264.515,99
PAD	32.133,20	601,30	12.417,41
Dana Perimbangan	549.880,43	65.949,05	236.398,31
Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah	51.299,82	72,84	16.413,92
Total Belanja	530.829,21	60.737,20	253.302,74

*Sumber : Hasil penelitian 2007 (diolah)*

**Tabel 4.3 Deskripsi data tahun 2005 (dalam jutaan rupiah)**

Item APBD	Maximum	Minimum	Rata-rata
Total Penerimaan	867.247,65	100.346,66	312.634,54
PAD	35.947,63	1.368,27	14.466,13
Dana Perimbangan	821.336,88	92.276,72	275.466,30
Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah	53.401,15	6.701,67	23.734,02
Total Belanja	543.110,68	104.520,99	270.572,75

*Sumber : Hasil penelitian 2007 (diolah)*

**Tabel 4.4 Deskripsi data tahun 2006 (dalam jutaan rupiah)**

Item APBD	Maximum	Minimum	Rata-rata
Total Penerimaan	716.085,14	201.510,03	402.700,26
PAD	32.849,57	1.463,03	14.936,93
Dana Perimbangan	678.374,31	197.684,00	374.093,27
Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah	47.258,25	2.363,00	14.291,43
Total Belanja	853.385,14	214.557,52	437.326,45

*Sumber : Hasil penelitian 2007 (diolah)*

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Pembandingan

#### 1) PAD

**Tabel 4.5 Analisis Pembandingan (dalam jutaan rupiah)  
Item Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun 2004-2006**

No	Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		2004-2005	2005-2006
1	Kota Bengkulu	(1.575,17)	4.406,44
2	Kab. Kaur	766,97	94,76
3	Kab. Mukomuko	919,46	1.692,50
4	Kab. Bungo	1.422,61	5.297,99
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	(2.262,77)	608,28
6	Kota Jambi	3.814,43	(3.098,06)
7	Kab. Lahat	4.450,97	(496,48)
8	Kab. Musi Banyuasin	4.023,30	(229,72)
9	Kab. Musi Rawas	855,39	7.250,68
10	Kab. Muara Enim	6.435,65	(6.450,60)
11	Kab. Ogan Komering Ilir	2.809,66	(1.881,35)
12	Kota Prabumulih	2.314,64	(550,39)
13	Kota Pagar Alam	1.226,02	303,73
14	Kota Lubuk Linggau	1.491,43	3.178,09
15	Kab. Banyuasin	3.850,53	1.133,47
16	Kab. Lampung Selatan	2.671,49	3.798,63
17	Kab. Lampung Tengah	936,40	(195,41)
18	Kab. Tanggamus	2.396,99	(1.048,79)
19	Kab. Tulang Bawang	139,94	1.005,59
20	Kota Metro	2.580,67	252,12
21	Kab. Bangka	(2.210,04)	(1.865,97)
22	Kab. Belitung	6.534,65	(533,73)
23	Kota Pangkal Pinang	3.527,47	(1.843,56)
Rata-rata		2.048,73	470,79
Max		6.534,65	7.250,68
Min		(2.262,77)	(6.450,60)

*Sumber : Hasil penelitian 2007 (diolah)*

## 2) Dana Perimbangan

**Tabel 4.6 Analisis Pembandingan (dalam jutaan rupiah)  
Item Dana Perimbangan  
Tahun 2004-2006**

No	Kabupaten/Kota	DANA PERIMBANGAN	
		2004-2005	2005-2006
1	Kota Bengkulu	13.860,58	122.079,89
2	Kab. Kaur	26.327,67	105.407,28
3	Kab. Mukomuko	29.020,31	123.372,95
4	Kab. Bungo	32.576,51	104.365,25
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	39.518,26	42.600,07
6	Kota Jambi	36.755,99	78.062,46
7	Kab. Lahat	258.080,18	115.061,17
8	Kab. Musi Banyuasin	71.456,45	(142.962,57)
9	Kab. Musi Rawas	57.912,25	129.535,74
10	Kab. Muara Enim	58.563,75	92.398,32
11	Kab. Ogan Komering Ilir	(90.208,01)	161.476,57
12	Kota Prabumulih	41.364,14	25.640,47
13	Kota Pagar Alam	26.258,54	63.683,59
14	Kota Lubuk Linggau	53.263,37	45.444,55
15	Kab. Banyuasin	103.450,17	105.149,12
16	Kab. Lampung Selatan	15.704,90	213.301,25
17	Kab. Lampung Tengah	30.432,83	231.406,03
18	Kab. Tanggamus	(3.417,44)	192.042,33
19	Kab. Tulang Bawang	26.693,34	141.558,80
20	Kota Metro	6.363,37	42.313,40
21	Kab. Bangka	23.314,27	113.071,25
22	Kab. Belitung	23.576,87	95.551,39
23	Kota Pangkal Pinang	17.695,40	67.860,97
Rata-rata		9.067,99	98.626,97
Max		271.456,45	231.406,03
Min		(90.208,01)	(142.962,57)

Sumber : Hasil penelitian 2007 (diolah)

## 3) Lain-lain penerimaan yang sah

**Tabel 4.7 Analisis Pembanding (dalam jutaan rupiah)  
Item lain-lain penerimaan yang sah  
Tahun 2004-2006**

No	Kabupaten/Kota	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	
		2004-2005	2005-2006
1	Kota Bengkulu	5.997,82	(10.574,41)
2	Kab. Kaur	4.391,72	(4.338,67)
3	Kab. Mukomuko	5.371,95	(5.456,72)
4	Kab. Bungo	1.997,88	(185,30)
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.188,90	(3.721,59)
6	Kota Jambi	(6.896,97)	4.901,66
7	Kab. Lahat	10.175,07	(10.491,44)
8	Kab. Musi Banyuasin	10.258,27	(7.970,21)
9	Kab. Musi Rawas	6.818,13	(13.067,13)
10	Kab. Muara Enim	(457,72)	(31.543,04)
11	Kab. Ogan Komering Ilir	13.253,63	(8.569,76)
12	Kota Prabumulih	6.262,14	(4.442,49)
13	Kota Pagar Alam	2.869,40	(7.367,32)
14	Kota Lubuk Linggau	(12.709,19)	15.046,11
15	Kab. Banyuasin	9.491,42	(7.860,71)
16	Kab. Lampung Selatan	40.022,46	(6.142,90)
17	Kab. Lampung Tengah	2.130,72	(30.095,43)
18	Kab. Tanggamus	37.669,36	(24.487,20)
19	Kab. Tulang Bawang	(5.163,51)	(745,76)
20	Kota Metro	13.038,71	(5.211,55)
21	Kab. Bangka	851,33	(12.743,53)
22	Kab. Belitung	14.300,37	(18.405,86)
23	Kota Pangkal Pinang	(1.819,59)	(14.263,80)
Rata-rata		7.001,84	(9.032,05)
Max		40.022,46	15.046,11
Min		(12.709,19)	(31.543,04)

Sumber : Hasil penelitian 2007 (diolah)



## 4) Total Penerimaan

**Tabel 4.8 Analisis Pembeding (dalam jutaan rupiah)  
Item Total Penerimaan  
Tahun 2004-2006**

No	Kabupaten/Kota	TOTAL PENERIMAAN	
		2004-2005	2005-2006
1	Kota Bengkulu	18.283,25	115.911,90
2	Kab. Kaur	31.486,36	101.163,37
3	Kab. Mukomuko	35.311,70	119.608,74
4	Kab. Bungo	35.997,00	109.477,94
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	40.444,39	39.486,75
6	Kota Jambi	33.673,44	79.866,06
7	Kab. Lahat	72.706,21	104.073,26
8	Kab. Musi Banyuasin	285.738,03	(151.162,51)
9	Kab. Musi Rawas	65.585,78	123.719,28
10	Kab. Muara Enim	64.541,67	54.404,68
11	Kab. Ogan Komering Ilir	(74.144,73)	151.025,47
12	Kota Prabumulih	49.940,93	20.647,59
13	Kota Pagar Alam	30.353,96	56.620,01
14	Kota Lubuk Linggau	42.045,61	63.668,75
15	Kab. Banyuasin	116.792,12	98.421,88
16	Kab. Lampung Selatan	58.398,85	210.956,97
17	Kab. Lampung Tengah	33.499,95	201.115,19
18	Kab. Tanggamus	36.648,91	166.506,35
19	Kab. Tulang Bawang	21.669,79	141.818,62
20	Kota Metro	21.982,76	37.353,97
21	Kab. Bangka	21.955,56	98.461,74
22	Kab. Belitung	44.411,90	76.611,78
23	Kota Pangkal Pinang	19.403,28	51.753,61
Rata-rata		48.118,55	90.065,71
Max		285.738,03	210.956,97
Min		(74.144,73)	(151.162,51)

Sumber : Hasil penelitian 2007 (diolah)

## 5) Total Belanja

No	Kabupaten/Kota	TOTAL BELANJA	
		2004-2005	2005-2006
1	Kota Bengkulu	1.921,98	124.745,65
2	Kab. Kaur	43.783,79	110.036,53
3	Kab. Mukomuko	30.657,40	133.382,86
4	Kab. Bungo	21.473,10	183.818,27
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	18.418,87	128.061,07
6	Kota Jambi	47.462,00	113.837,86
7	Kab. Lahat	59.866,03	213.207,87
8	Kab. Musi Banyuasin	12.281,47	310.274,46
9	Kab. Musi Rawas	16.350,94	235.643,10
10	Kab. Muara Enim	16.981,26	202.058,27
11	Kab. Ogan Komering Ilir	(103.895,97)	202.642,92
12	Kota Prabumulih	22.900,90	153.577,56
13	Kota Pagar Alam	21.038,25	95.867,01
14	Kota Lubuk Linggau	23.626,55	165.841,54
15	Kab. Banyuasin	(16.878,62)	117.502,97
16	Kab. Lampung Selatan	49.393,47	231.982,60
17	Kab. Lampung Tengah	38.307,73	345.449,89
18	Kab. Tanggamus	16.761,45	226.386,95
19	Kab. Tulang Bawang	12.627,59	168.626,30
20	Kota Metro	7.881,05	86.695,41
21	Kab. Bangka	16.695,86	104.151,92
22	Kab. Belitung	28.652,50	104.778,52
23	Kota Pangkal Pinang	10.902,60	76.765,61

Rata-rata	17.270,01	166.753,70
Max	59.866,03	345.449,89
Min	(103.895,97)	76.765,61

Sumber : Hasil penelitian 2007 (diolah)

#### 4.2.2 Analisis Trend

**Tabel 4.9 Trend (dalam persen)  
Item Total Belanja  
Tahun 2004-2006**

No	Kabupaten/Kota	TOTAL PENERIMAAN	
		2004-2005	2005-2006
1	Kota Bengkulu	208,96	252,11
2	Kab. Kaur	245,72	300,81
3	Kab. Mukomuko	244,31	304,01
4	Kab. Bungo	216,50	243,07
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	218,32	215,12
6	Kota Jambi	211,19	223,86
7	Kab. Lahat	221,81	225,63
8	Kab. Musi Banyuasin	249,14	182,57
9	Kab. Musi Rawas	218,69	229,71
10	Kab. Muara Enim	216,58	211,99
11	Kab. Ogan Komering Ilir	183,35	240,68
12	Kota Prabumulih	228,02	209,05
13	Kota Pagar Alam	218,94	229,71
14	Kota Lubuk Linggau	223,84	229,15
15	Kab. Banyuasin	240,58	224,32
16	Kab. Lampung Selatan	214,08	244,58
17	Kab. Lampung Tengah	208,16	245,31
18	Kab. Tanggamus	210,66	243,76
19	Kab. Tulang Bawang	207,58	246,10
20	Kota Metro	212,39	218,74
21	Kab. Bangka	214,23	255,88
22	Kab. Belitung	231,34	241,16
23	Kota Pangkal Pinang	212,13	228,86
Rata-rata		219,85	236,79
Max		249,14	304,01
Min		183,35	182,57

Sumber : Hasil penelitian 2007 (diolah)

#### 4.2.3 Analisis Common-Size Financial Statemenment (CSFS)

##### 1) Tahun 2004

Kabupaten Belitung berada di posisi teratas dalam persentase kontribusi PAD nyadibandingkan dengan kabupaten lainnya sebesar 13,79%.. Kontribusi yang memberikan cukup besar dalam perolehan PAD adalah item lain-lain PAD yang sah.

Kontribusi terbesar total penerimaan daerah umumnya berasal dari dana perimbangan. Rata-rata kontribusi dana perimbangan untuk tahun 2004 kabupaten dan kota di wilayah sumbagsel adalah sebesar 88,62% dari total penerimaan daerah. Kontribusi terbesar diperoleh kabupaten Tanggamus sebesar 97,45%.

Sementara kontribusi dana perimbangan beraal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Umumnya masing-masing kabupaten kota menerima lebih dari 50% dari total dana

perimbangan yang diterima, hanya kabupaten Musi Banyuasin dan kota Prabumulih yang menerima dibawah 50%.

Item Belanja daerah kontribusi terbesar pada umumnya diberikan untuk belanja Pegawai, rata-rata kontribusi belanja pegawai sebesar 52,40%. Kontribusi terendah dialami oleh Kabupaten Musi Banyuasin yang hanya sebesar 25,22%.

#### 2) Tahun 2005 dan 2006

Kontribusi untuk penerimaan daerah masih berasal dari dana perimbangan dengan rata-rata kontribusi untuk kabupaten/kota sebesar 87,32%. Kota Lubuk Linggau memperoleh dana perimbangan paling tinggi sebesar 95,87%. PAD terbesar diraih oleh kabupaten Belitong yaitu sebesar 14,01% dengan kontribusi dana perimbangan terkecil sebesar 71,15%

Belanja daerah juga masih dialokasikan sebagian besar pada belanja pegawai walaupun rata-rata untuk tahun 2005 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 45,47%. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kontribusi item belanja daerah yang lain.

Kontribusi terbesar untuk penerimaan daerah masih berasal dari dana perimbangan dengan rata-rata sebesar 92,71%. Pada tahun 2006 kontribusi dana perimbangan mengalami peningkatan. Hal ini berarti pula pada umumnya kabupaten dan kota mengalami penurunan PAD dan lain-lain penerimaan yang sah untuk kontribusi penerimaan daerah.

Belanja daerah tahun 2006 masih diperuntukkan sebagian besar untuk belanja pegawai walaupun rata-rata untuk tahun 2006 mengalami penurunan lagi sebesar 41,49%. Hal ini menyebabkan peningkatan untuk item belanja daerah yang lain, yang paling besar peningkatan kontribusinya adalah pada belanja modal.

### 4.2.4 Analisis Rasio

#### 1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Analisis rasio keuangan daerah Belitong selama 3 tahun berturut-turut merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dengan nilai persentase sebesar 13,79%, 14,01%, 9,72%. Dapat disimpulkan bahwa kabupaten Belitong memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang rata-rata di bawah 10%. Sehingga Belitong dapat mengurangi ketergantungan daerahnya pada sumber dana ekstern.

**Analisis Rasio Kemandirian  
Kabupaten dan Kota di Wilayah Sumbagsel  
Tahun Anggaran 2004-2006  
(dalam persen)**

NO	Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian		
		2004	2005	2006
1	Kota Bengkulu	7.59	6.26	5.42
2	Kab. Kaur	0.87	1.36	0.73
3	Kab. Mukomuko	1.45	1.80	1.61
4	Kab. Bungo	9.54	8.75	7.57
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	7.28	5.28	4.79
6	Kota Jambi	10.68	10.74	7.92
7	Kab. Lampung Selatan	3.20	3.37	2.88
8	Kab. Lampung Tengah	2.48	2.50	1.69
9	Kab. Tanggamus	2.55	2.93	1.85
10	Kab. Tulang Bawang	1.81	1.73	1.41
11	Kota Metro	5.93	6.57	5.64
12	Kab. Lahat	4.30	4.62	3.58
13	Kab. Musi Banyuasin	1.63	1.56	1.86
14	Kab. Musi Rawas	3.39	3.06	3.70
15	Kab. Muara Enim	6.95	7.38	5.32
16	Kab. Ogan Komering Ilir	2.88	4.22	2.64
17	Kota Prabumulih	4.20	4.30	3.72
18	Kota Pagar Alam	1.66	2.04	1.69
19	Kota Lubuk Linggau	4.27	4.13	4.33
20	Kab. Banyuasin	1.75	2.20	1.99
21	Kab. Bangka	13.05	10.17	5.85
22	Kab. Belitung	13.79	14.01	9.72
23	Kota Pangkal Pinang	8.40	9.46	6.54
<b>Rata-rata</b>		<b>5.20</b>	<b>5.15</b>	<b>4.02</b>

Sumber: Hasil penelitian 2007 (diolah)

### 3) Rasio Kesenjangan

Rasio kesenjangan menunjukkan prioritas alokasi pada belanja daerah. Pada tahun 2004 Kabupaten Lampung Tengah memprioritaskan dananya untuk belanja pegawai hingga 69,56% dan tahun 2005 Kabupaten Tanggamus memprioritaskan belanja pegawainya hingga 69,56% dalam tahun 2005 dan untuk tahun 2006 kota Bengkulu memprioritaskan belanja pegawai hingga 61,56%.

## 5. Implikasi dan Keterbatasan

### 5.1 Kesimpulan

Dengan menggunakan empat teknik analisis yaitu perbandingan, *trend*, *CSFS*, dan rasio maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1) Analisis perbandingan

Pada umumnya terjadi peningkatan pada total penerimaan daerah masing-masing kabupaten dan kota di wilayah Sumbagsel dari tahun 2004 sampai dengan 2006.



Peningkatan pada total penerimaan diikuti dengan. peningkatan total belanja daerah diseluruh kabupaten dan kota di sumbagsel.

2) *Analisis trend*

Rata-rata trend total penerimaan pada tahun 2005 adalah sebesar 219,85% dan meningkat pada tahun 2006 sebesar 236,79%. Rata-rata *trend* total belanja pada tahun 2005 adalah sebesar 211,83% dan meningkat pada tahun 2006 sebesar 265,39%. Rata-rata *trend* surplus.defisit pada tahun 2005 sebesar 259,50% dan menurun menjadi 175,95% pada tahun 2006. Akibat kecenderungan peningkatan pada struktur APBD yaitu penerimaan daerah dan belanja daerah maka untuk surplus/defisit kecenderungan mengalami penurunan, karena besar kecilnya peningkatan pada total penerimaan dan total belanja

3) *Analisis Common Size Financial Statement (CSFS)*

Peningkatan total penerimaan daerah disebabkan karena peningkatan kontribusi dari dana perimbangan, untuk PAD dan lain-lain penerimaan yang sah pada umumnya terjadi penurunan. Peningkatan total belanjadaerah disebabkan karena pemerintah daerah sudah memprioritaskan peningkatan belanja daerahnya untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan sosial masyarakat.

4) *Analisis Rasio*

Rata-rata kemandirian keuangan daerah kabupaten atau kota di wilayah Sumbagsel dari tahun 2004 sampai dengan 2006 yaitu sebesar 5,20%, 5,15%, 4,02%. Dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah bahkan mempunyai kecenderungan menurun.

5) Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada total penerimaan dan total belanja, tapi sebenarnya yang terjadi adalah penurunan kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah Sumbagsel dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 karena tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah bahkan mengalami penurunan.

## 5.2 Implikasi Penelitian

1) Untuk Pemerintah Daerah

- a) Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kembali pengelolaan sumber-sumber keuangan daerahnya untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana dari pemerintah pusat/provinsi, baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang

telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini dikuasai oleh pemerintah pusat/provinsi.

- b) Diharapkan Pemda menekan belanja daerah, meningkatkan PADnya dengan membuat kebijakan pajak daerah dan retribusi, meningkatkan SDM, mendirikan wirausaha perusahaan daerah yang baru dan mengembangkan potensi daerah yang ada secara optimal

#### 2) Untuk pemerintah Pusat

- a) Diharapkan Pemerintah pusat memberikan wewenang sebesar-besarnya kepada kabupaten/kota di wilayah sumbagsel yang dianggap mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerahnya terhadap pusat.
- b) Pemerintah pusat diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan terhadap pusat.
- c) Pemerintah pusat diharapkan dapat konsisten terhadap kebijakan maupun peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Sebaiknya, diberikan pendidikan dan pembinaan kepada pemerintah daerah sehingga dapat menjalankan aturan dan kebijakan dengan baik dan benar.

#### 3) Untuk Masyarakat

- a) Diharapkan masyarakat meningkatkan partisipasinya dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan PAD, dengan meningkatnya PAD diharapkan meningkatkannya belanja modal (pembangunan) dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat diharapkan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- b) Masyarakat diharapkan aktif mengontrol dan menilai kinerja pemerintah, melalui wakil-wakil rakyat di DPRD melalui Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

- 1) Data penelitian ini dibatasi hanya pada laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Sumbagsel, karena tidak semua daerah dapat menyusun dan menyajikan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
- 2) Keterbatasan data penelitian menyebabkan hasil yang diperoleh belum bisa digambarkan secara maksimal, dari data laporan realisasi APBD teknik analisis rasio yang bisa diunakan hanya dua dari lima rasio yang ada yaitu keserasian dan kemandirian.

- 3) Adanya kebijakan peraturan pemerintah yang selalu berubah-ubah sehingga adanya pembatasan tahun anggaran. Laporan realisasi APBD yang diteliti dibatasi dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 200, pembatasan anggaran dilakukan karena tahun anggaran 2004 APBD mulai disusun dengan menggunakan format sesuai dengan tata cara penyusunan APBD yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 sehingga dapat diperbandingkan.

#### 5.4 Saran

- 1) Agar penelitian menjadi lebih baik, sebaiknya dilakukan penelitian dengan masalah yang sama di daerah yang berbeda dengan menggunakan seluruh data laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hasilnya lebih akurat.
- 2) Dengan menggunakan seluruh data laporan keuangan pemerintah daerah, maka teknik analisis rasio dapat digunakan seluruhnya, sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan lainnya.
- 3) Sebaiknya digunakan data sesuai dengan format cara penyusunan APBD yang terbaru yaitu permendagri nomor 13 tahun 2006 karena lebih *up to date*.

#### Daftar Referensi

- Atlas Propinsi, Indonesia, dan Dunia. 2006. Surabaya : Penerbit Lintas Media Jombang
- Bastian, INDRA. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi FE UGM
- Dwiyanto, Agus, DKK. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Gibson, Charles. 1992. *Financial Statement Analysis*. Ohio : South Westers Publishing Co.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Haris, Hana Triana. 2005. *Analisis APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada Era Otonomi Daerah*. Skripsi tidak dipublikasikan. Padang, Sumatera Barat : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Husein, UMAR. 1997. *Riset Akuntansi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi pertama Yogyakarta : BPFE
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mokoginto, Abdullah. 2002. *Penyusunan Anggaran Tahunan*. Dalam Abdul Halim (Penyunting). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta :UPP AMP YKPN
- Munawir. 1983. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : Liberty
- Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pmeeritah Daerah*. Jakarta : Andi offset
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

- .....2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
  - .....2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
  - .....2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
  - .....2004. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2004 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*
  - .....2004. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
  - .....2003. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
  - .....2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
  - .....2004. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*
  - .....2000. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang *Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*
  - .....2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah*
  - .....1999 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
  - .....1999. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah*
- Sugiri, Slamet. 1998. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta : UPPAMPYKPN
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta
- Widodo. 2002. *Analisis Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali*. D
- Lam Abdul Halim (Penyunting) *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat

<http://id.wikipedia.org/wiki/kotadankabupaten>. Jum'at, 26 Oktober 2007,

Pukul 18.45 WIB.

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Selasa, 30 Oktober 200, Pukul 19.30 WIB